



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Jambi

Weni Febriani, Netty Herawaty*, Gandy Wahyu Maulana Zulma

Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author: netherawaty@unjia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 21 Desember 2022

Tanggal revisi 29 Maret 2023

Tanggal Accepted 30 Maret 2023

Key words:

Budgeting, Planning, Procurement, Absorption, HR

DOI:

10.36805/akuntansi.v8i1.3340

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and determine the effect of budget planning, human resources, and procurement of goods/services on delays in budget absorption for work units Ministries/Institutions in the Jambi KPPN environment. This type of research is quantitative with a population of 244 SATKERS at KPPN Jambi. To take a sample of 89 samples used the purposive sampling technique. The research variables are three independent variables, namely budget planning, human resources, and procurement of goods/services, and one dependent variable is the delay in budget absorption. Using multiple linear regression analysis with SPSS 25, the hypothesis was tested to analyze the correlation of the variables. Based on the research results, budget planning affects the delay in budget absorption, human resources affect the delay in budget absorption, and the procurement of goods/services affects the delay in budget absorption.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari perencanaan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran bagi satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L) di lingkungan KPPN Jambi. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan populasi yang digunakan sebanyak 244 satker K/L di KPPN Jambi. Untuk pengambilan sampel sebanyak 89 sampel digunakan teknik purposive sampling. Variabel penelitian yaitu tiga variabel independen yakni perencanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa, dan satu variabel dependen yaitu keterlambatan penyerapan anggaran. Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 25, hipotesis diuji untuk menganalisis korelasi variabelnya. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran.

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu rencana keuangan pemerintah Indonesia pertahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Undang-Undang Nomor 6, 2021) tentang APBN. Pemanfaatan anggaran menjadi salah satu tanda berhasil atau tidaknya suatu program/kebijakan. Belanja pemerintah pusat sangat penting bagi pemenuhan perekonomian nasional. Belanja pemerintah disalurkan ke kementerian dan lembaga, serta Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelolaan anggaran harus dilakukan sebaik mungkin dimulai dari perencanaan, sampai tahap pelaporan serta pertanggungjawaban, namun pelaksanaan oleh pemerintah masih ditemukan lambatnya penyerapan anggaran oleh K/L.

Anggaran yang terserap sesuai perencanaan awal mengakibatkan perekonomian berjalan dengan seharusnya. Permasalahan utama anggaran pada pemerintahan yaitu tidak sesuai penyerapan dengan targetnya sehingga mengakibatkan kerugian negara secara ekonomis karena menanggung bunga dan adanya idle cash pada rekening pemerintah. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu serapan anggaran tidak maksimal dengan batas ideal penyerapan pada setiap triwulan yang menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran baik di pemerintah pusat maupun ditingkat K/L. Tabel 1 menampilkan realisasi belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2020 dan 2021.

Tabel 1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Triwulan	APBN	Realisasi	Persentase
2020	I	1.683,48	277,89	16,50%
	II	1.975,2	668,2	33,83%
	III	1.975,2	1.211,4	61,30%
	IV	1.975,2	1.827,26	92,51%
		1.954,55	350,08	17,91%
2021	I			
	II	1.954,55	796,27	40,74%
	III	1.954,55	1.265,4	64,74%
	IV	1.954,55	2.001,1	102,4%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Pada Tabel 1 terlihat pada tahun 2021 realisasi penyerapan anggaran meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,41% (triwulan I), 6,91% (triwulan II), 3,44% (triwulan III) dan 9,89% (triwulan IV). Pola penggunaan anggaran terus berulang dan tidak mencapai sasaran 25% setiap triwulan atau secara kumulatif triwulan I (25%), triwulan II (50%), triwulan III (75%), dan triwulan IV (100%) (Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019).). Tren serapan cenderung melonjak pada akhir tahun (triwulan IV) menandakan terlambatnya penyerapan yang memiliki dampak pada kinerja dan kebijakan APBN. Trisna et al (2020) mengungkapkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh keterlambatan dalam menindaklanjuti rencana penganggaran dan pengalokasian dana sebagaimana dijelaskan dalam DIPA. Pola terlambatnya penyerapan ini bukan hanya pada pemerintah pusat, namun juga K/L yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman satker K/L dalam pelaksanaan program dan proses pengadaan barang/jasa. Faktor eksternal seperti proses pembahasan yang lama di DPR dan faktor-faktor lainnya.

Beberapa SATKER K/L di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Indonesia terbentur kondisi penyerapan anggaran yang lamban. Salah satunya sejumlah 48% satker K/L pada KPPN Jambi tahun anggaran 2021 dimana penyerapan satker sebanyak 95 satker (triwulan I), 73 satker (triwulan II), 58 satker (triwulan III), dan 25 satker (triwulan IV). Target penyerapannya yaitu triwulan I (15%), triwulan II (40%), triwulan III (60%), dan triwulan IV (90%) (Peraturan DJPB No. PER-4/PB, 2021). Tidak hanya penyerapan anggaran yang lambat pada tahun 2021, namun pola penyerapan satker di KPPN Jambi juga menunjukkan adanya penyerapan yang lamban pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, semakin sedikit satker yang lamban penyerapannya, meski keterlambatan penyerapan ini masih terjadi. Ada unsur-unsur yang dapat menyebabkan lambannya penyerapan, antara lain perencanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa.

Perencanaan merupakan acuan penyusunan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan periode tertentu. Perencanaan mengacu pada persiapan pendapatan, pengeluaran dan rencana keuangan untuk periode tertentu. Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi aspek yang melekat dalam perencanaan anggaran, karena program tersebut disusun sesuai dengan sumber

anggaran yang tersedia. Menurut Fahnur (2018), pertimbangan perencanaan anggaran memengaruhi

Menurut Zulaikah, B., & Burhany (2019), pertimbangan perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. SDM merupakan harta paling penting dari suatu organisasi/perusahaan karena keberhasilan organisasi/perusahaan sangat bergantung pada unsur manusia (Sedarmayanti, 2017). SDM sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pemerintah. Untuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, kualitas SDM yang meliputi pengetahuan, motivasi, keterampilan, dan sikap menjadi parameter standar. Menurut Karmilawati (2020), SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Sedangkan Trisna et al (2020) mengungkapkan bahwa SDM tidak memiliki pengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan pengadaan yaitu aktivitas memperoleh barang/jasa sesuai dengan strategi pengadaan, menjadi proses utama dalam penyerapan anggaran. Proses pelaksanaan pengadaan memakan waktu lama, ketepatan waktu dalam penetapan standar harga, proses pembentukan panitia, dan pelaksanaan lelang sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dilakukan dan terserap sesuai dengan rencana awal pemerintah. Menurut Fahnur (2018), Keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh pengadaan barang/jasa. Sedangkan Riska (2018) mengungkapkan bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh penyerapan anggaran.

Penelitian ini mengacu pada faktor-faktor yang dikaji oleh Fahnur (2018). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan *descriptives* kualitatif dengan subjeknya yakni satker di KPPN Medan II, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjeknya yakni satker di KPPN Jambi.

2. Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Anggaran yaitu rencana tertulis secara kuantitatif dari organisasi untuk kegiatan pada waktu tertentu dan sering dinyatakan dalam uang atau barang/jasa (Nafarin, 2015). Perencanaan anggaran adalah laporan tentang ukuran kinerja yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu tertentu (Mardiasmo, 2018). Pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Lembaga Daerah yang didanai dengan APBN/APBD, diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan dan diakhiri penyerahan hasil kerja (Pepres RI No. 12, 2021). Keterlambatan penyerapan anggaran mengacu pada keterlambatan pelaksanaan rencana anggaran sejalan dengan alokasi anggaran DIPA (Trisna et al., 2020).

Pengembangan Hipotesis

Aspek penting dari suatu organisasi yaitu kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut Trisna et al (2020), perencanaan yang tidak memadai menyebabkan perubahan yang menyebabkan kegiatan menjadi tertunda. Apabila telah dilakukan perencanaan yang matang seharusnya dapat menjamin tidak adanya revisi sehingga anggaran dapat diserap secara maksimal selama satu periode anggaran. Karmilawati (2020) mengemukakan perencanaan anggaran mengalami hambatan disebabkan ketidaksesuaian anggaran yang diajukan dengan DIPA yang disahkan sehingga perencanaan tidak tepat sasaran.

H1: Pengaruh perencanaan anggaran terhadap keterlambatan penyerapan anggaran satker K/L di Wilayah pembayaran KPPN Jambi.

Perencanaan menurut Siagian (2014) yaitu semua proses pemikiran dan penetapan secara sempurna yang bermula dari masalah yang akan dilakukan di periode yang akan datang dalam rangka perolehan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. SDM menjadi pemeran utama yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah berkaitan dengan mengelola keuangan dan anggaran. Pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan sikap menjadi tolak ukur kualitas SDM untuk melaksanakan tugas secara efektif. Karmilawati (2020) mengemukakan kekurangan jumlah pegawai karena adanya mutasi pegawai yang tidak merata dan kurangnya pemahaman menyebabkan tertundanya proses pencairan.

H2: Pengaruh SDM terhadap keterlambatan penyerapan anggaran satuan satker K/L di wilayah pembayaran KPPN Jambi.

Pengadaan barang/jasa dapat mempengaruhi daya serap anggaran pemerintah, apabila semakin tinggi pengadaan barang/jasa maka semakin besar pula kemampuan untuk menyerap anggaran. Sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang/jasa, semakin sedikit anggaran yang diserap. Karmilawati (2020) mengemukakan keterlambatan pengadaan barang/jasa dikarenakan adanya kekurangan pegawai bersertifikat dan lambatnya jadwal lelang sehingga mempengaruhi proses penyerapan anggaran.

Penelitian Fahnur (2018) mengatakan permasalahan yang kerap terjadi dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan adalah perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan, data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran, salah penentuan akun sehingga perlu melakukan revisi dokumen anggaran, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah/tidak sesuai harga pasar, adanya penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah, tidak mengalokasikan/menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan, TDR salah/tidak lengkap, RAB tidak sesuai dengan satuan biaya, serta tidak adanya formalisasi rencana penarikan dana (Sudarwati et al, (2017).

H3: Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran satker K/L di wilayah pembayaran KPPN Jambi.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data *cross sectional* yaitu data dari hasil observasi entitas yang berbeda (seperti orang, perusahaan atau suatu bangsa) dimana variabel tersebut diukur pada satu titik waktu yang sama (Ghozali, 2018).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jambi pada tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 244 satuan kerja. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 116 satuan dimana kriteria yang digunakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB (2021) adalah satuan kerja dengan persentase realisasi anggaran tidak mencapai 15% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 60% pada triwulan III, dan 90% pada triwulan IV tahun anggaran 2021. Target penyerapan anggaran pada triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan bentuk skala likert. Pemberian skor jawaban kuesioner adalah 5 = Selalu, 4 = Sering, 3 = Kadang-kadang, 2 = Pernah, 1 = Tidak Pernah

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini ada empat variabel yang digunakan yaitu perencanaan anggaran (X1), sumber daya manusia (X2), pengadaan barang/jasa (X3) dan keterlambatan penyerapan anggaran (Y).

Variabel Dependen (Terikat)

Keterlambatan penyerapan anggaran (Y) merupakan keterlambatan waktu dalam menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam DIPA (Trisna dkk., 2020). Indikator keterlambatan penyerapan anggaran adalah anggaran tidak terserap secara maksimal dalam satu tahun anggaran, penyerapan anggaran tidak tepat waktu, dan penyerapan anggaran rendah pada awal periode dan tinggi pada akhir anggaran (Zulaikah, B., & Burhany, D. I. 2019).

Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel stimulus, prediktor, antecedent yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2020). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan Anggaran (X1)

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam mekanisme pengelolaan anggaran. Terkait penyusunan rencana anggaran pemerintah pusat mempersiapkan dan menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah pusat bersama DPR melakukan pembahasan mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran (Setyawan, 2016). Indikator perencanaan anggaran terdiri dari proses penyusunan perencanaan, kondisi penyusunan dokumen anggaran, pembahasan anggaran, dan revisi oleh pejabat berwenang (Trisna dkk., 2020).

2. Sumber Daya Manusia (X2)

Sumber daya manusia merupakan kemampuan dan ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyerapan anggaran (Fahnur, 2018). Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dapat mendorong sistem berjalan dengan maksimal dalam organisasi. Begitu juga dalam lingkup satuan kerja Kementerian/Lembaga tentunya membutuhkan pejabat dan pegawai yang berkualitas dan mampu berkompetensi dengan baik dalam mengelolah anggaran satuan kerja bersumber dari APBN. Indikator sumber daya manusia terdiri dari kuantitas (quantity), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), motivasi (motivation), dan sikap (attitude) (Zulaikah, B., & Burhany, D. I. 2019)

3. Pengadaan Barang/Jasa (X3)

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa (Trisna dkk., 2020). Indikator pengadaan barang/jasa terdiri dari penyusunan panitia pengadaan, penyusunan standar harga, dan pelaksanaan lelang (Zaenudinsyah, 2016).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dan analisis regresi linier berganda. Jenis penelitian ini memakai

sumber data primer dan bersifat kuantitatif. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan di satker K/L di KPPN Jambi melalui platform Google form. Populasi penelitian terdiri dari 244 satker. Teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling, kriteria penelitian yaitu satker yang proporsi realisasi anggarannya tidak meraih triwulan I (15%), triwulan II (40%), triwulan III (60%), dan triwulan IV (90%). Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, dari 244 satker pada KPPN Jambi untuk tahun anggaran 2021, 116 satker yang memenuhi kriteria dan hanya 89 sampel yang dapat diolah. Skala ordinal yang digunakan untuk pengukuran berkisar antara 1 sampai 5. Variabel dependennya yakni keterlambatan penyerapan anggaran sedangkan variabel deskriptif, validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, dan hipotesis merupakan metode analisis data penelitian yang digunakan (Dewi et al, 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 116 dan jumlah kembali sebanyak 89 buah. Profil responden memperlihatkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72 orang dan sisanya Wanita sebanyak 17 orang. Responden tamat SMA 20 orang, tamat Diploma 3 sebanyak 26 orang, Strata 1 sebanyak 21 orang, Strata 2 sebanyak 17 orang dan Strata 3 sebanyak 5 orang. Tabel 2 menampilkan hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	89	9	30	19.65	5.199
X1	89	11	37	26.10	6.685
X2	89	13	39	25.89	6.503
X3	89	8	32	22.61	5.832

Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022

Variabel perencanaan anggaran (X1) diperoleh nilai minimumnya 11 dan maksimumnya 37, dengan rata-rata 26,10, standar deviasinya 6,685. Variabel SDM (X2) diperoleh nilai minimumnya 13 dan maksimumnya 39, dengan nilai rata-ratanya 25,89, standar deviasinya 6,503. Variabel pengadaan barang/jasa (X3) diperoleh nilai minimumnya 8 dan maksimumnya 32, dengan rata-ratanya 22,61, standar deviasinya 5,832.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran (X1) minimum sebesar 11 hari dan maksimum sebesar 37 hari. SDM (X2) jumlah minimum 13 orang dan maksimal sebanyak 39 orang dan pengadaan barang/jasa paling cepat 8 hari dan maksimal 32 hari. Validitas instrumen penelitian yang meliputi sebanyak dua puluh sembilan pertanyaan diperiksa untuk mengetahui apakah semua variabel dalam penelitian dapat dinyatakan valid. Hasil dari uji validitas pada item pertanyaan diperoleh nilai rata-rata r hitung diatas r tabel ($>0,208$) maka dinyatakan valid. Hasil uji realibitas penelitian pada item pertanyaan diperoleh nilai rata-ratanya $> 0,70$ (Cronbach Alpha). Dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan variabelnya atau sebanyak dua puluh sembilan butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat disimpulkan teruji reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel. Uji normalitas dimanfaatkan guna mengetahui apakah terdapat faktor pengganggu atau apakah variabel berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). Tabel 3 menampilkan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) untuk uji normalitas.

Tabel 3
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
Kolmogorov Smirnov Test

N	89
Test Statistic	0.086
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.100

Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022

Hasil dari Tabel 3 memperlihatkan sampel sebanyak 89 satuan kerja dan diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05, ini maknanya bahwa data berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas menentukan apakah model regresi menemukan keterkaitan antar variabel independennya dan menentukan apakah ada multikolonieritas dalam model regresi. Multikolonieritas terjadi jika tolerance < 0,10 atau VIF > 10 (Ghozali, 2018). Tabel 4 menampilkan uji multikolonieritas.

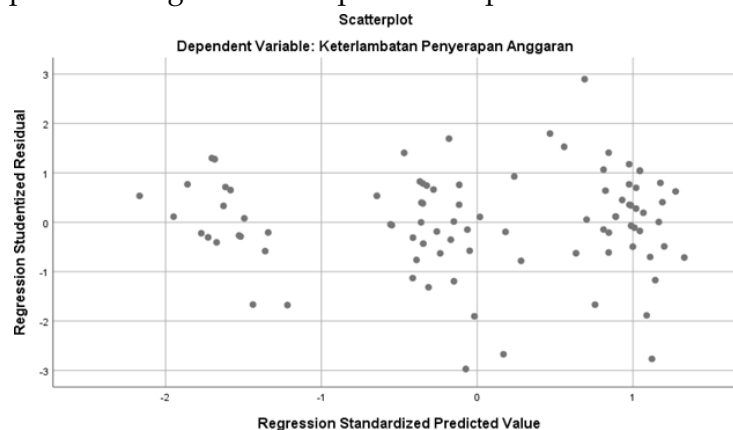
Tabel 4
Uji Multikolonieritas

Coefficients Statistics	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	.984	1.123	.876	.383			
X1	.202	.101	.260	1.999	.049	.156	6.400
X2	.254	.098	.318	2.591	.011	.175	5.708
X3	.301	.112	.338	2.681	.009	.166	6.023

Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022

Hasil pada Tabel 4, secara keseluruhan tolerance diperoleh lebih tinggi dari 0,10 dan VIF diperoleh lebih rendah dari 10 untuk masing-masing variabel, antara lain untuk variabel perencanaan anggaran (X1) nilai toleransinya 0,156 dan VIF-nya 6,400, untuk variabel SDM (X2) nilai toleransinya 0,175 dan VIF-nya 5,708, serta untuk variabel pengadaan barang/jasa (X3) nilai toleransinya 0,166 dan VIF-nya 6,023. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi multikolonieritas antar variabel independennya.

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan guna menentukan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Gambar 1 menampilkan hasil grafik scatterplot dalam penelitian.



Gambar 1
Gambar Grafik Scatterplot

Dari Gambar 1, titik-titik didistribusikan secara acak di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu Y. Disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan antara variabel independen dengan variabel dependennya (Ghozali, 2018). Tabel 5 menampilkan uji regresi linier berganda.

Tabel 5
Uji regresi linier berganda

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.984	1.123		.876	.383
	X1	.202	.101	.260	1.999	.049
	X2	.254	.098	.318	2.591	.011
	X3	.301	.112	.338	2.681	.009

Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022

Hasil yang ditampilkan dari Tabel 5 diperoleh nilai konstanta (α) 0,984, nilai (β_1) 0,202, nilai (β_2) 0,254, dan nilai (β_3) 0,301. persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan yakni:

$$Y = 0,984 + 0,202X_1 + 0,254X_2 + 0,301X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Uji t-statistik dimanfaatkan untuk menunjukkan sejauh mana satu variabel independen menjelaskan varians dari variabel dependennya (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka hipotesisnya diterima. Namun, jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka hipotesisnya ditolak.

Dari Tabel 5, hasil uji t-statistik dapat diinterpretasikan yakni:

1. Nilai signifikansi dari variabel perencanaan anggaran (X1) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y) diperoleh $0,049 < 0,05$, nilai t-hitungnya 1,999 atau lebih tinggi dari nilai t-tabelnya sebesar 1,988. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X1 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H1 diterima)
2. Nilai signifikansi dari variabel SDM (X2) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y) diperoleh $0,011 < 0,05$ Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X2 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H2 diterima).
3. Nilai signifikansi dari variabel pengadaan barang/jasa (X3) terhadap keterlambatan penyerapan anggaran (Y) $0,009 < 0,05$ Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa variabel X3 tersebut berpengaruh pada variabel Y (H3 diterima).

Koefisien determinasi dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana suatu model dapat menjelaskan varians dari variabel dependennya (Ghozali, 2018). Tabel 7 menampilkan analisis koefisien determinasi menggunakan *model Summary*.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881a	.776	.768	2.505

Sumber: data diolah, Output SPSS, 2022

Hasil pada Tabel 7, diperoleh nilai adjusted R square 0,768 atau 76,8%. Menunjukkan pengaruh variabel independen (perencanaan anggaran, SDM, dan pengadaan barang/jasa) terhadap variabel dependen (keterlambatan penyerapan anggaran) sebesar 76,8%. Sedangkan 23,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, menyatakan perencanaan anggaran dapat berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan anggaran yaitu laporan indikator kinerja yang dicapai dalam waktu tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan berdampak pada keterlambatan penyerapan jika perencanaan anggaran tidak dilakukan secara efektif. Terbukti dari tanggapan terhadap pertanyaan bahwa mayoritas responden (31,87%) memilih opsi skala ketiga (Kadang-kadang). Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa proporsi responden tertinggi pada pertanyaan kelima setuju dengan pernyataan "Periode penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat", sehingga kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu terlambat.

Jawaban responden terbesar kedua pada pilihan berskala 4 (Sering) sebesar 26,54%. Berdasarkan hasil tersebut pertanyaan keenam menunjukkan bahwa pembahasan anggaran terhambat dikarenakan "Anggaran kegiatan di blokir" pada 89 satker di KPPN Jambi. Hal ini dijelaskan didalam penelitian Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019)., tidak terdapat anggaran yang di blokir, tidak terdapat tambahan anggaran, serta penyusunan anggaran dan kegiatan yang detail merupakan perencanaan yang baik. Syafira & Vina (2020) menguraikan alasan pemblokiran anggaran saat merencanakan program/kegiatan karena kurangnya data pendukung. Temuan penelitian ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Temuan penelitian ini sejalan yang diungkapkan oleh Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), Trisna et al (2020), Fahnur (2018), Gagola (2017), Malahayati et al, (2015) dan Riska (2018) yang menemukan perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Pengaruh SDM Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Probabilitasnya terbukti signifikan dengan diperolehnya nilai 0,011 karena ($p < 0,05$). Sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan, menyatakan SDM berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Motivasi menjadi karakteristik psikologi manusia yang berkontribusi pada derajat komitmen seseorang (Hasibuan & Malayu, 2016). Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa motivasi SDM berkurang karena tidak ada mekanisme *reward and punishment* selama pengelolaan anggaran, sehingga mengakibatkan penurunan komitmen. Seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan, yang berdampak pada tertundanya penyerapan anggaran. Hal ini terlihat dari tanggapan terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada SDM, dimana mayoritas responden (32,16%) memilih opsi skala ketiga (Kadang-kadang). Berdasarkan data tersebut, pertanyaan dengan persentase tertinggi adalah yang keenam yaitu "Tidak ada mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran".

Menurut Karmilawati (2020), SDM membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi dalam merancang anggaran dan perumusan rencana. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan SDM berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran dengan melihat jawaban responden terbesar kedua pada pilihan berskala 4 (Sering) sebesar 28,65%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui persentase terbesar kedua merupakan pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa penyerapan anggaran terhambat dikarenakan "Pejabat/pegawai pengelola anggaran tidak terampil". Sebagaimana teori yang telah dijelaskan Hutapea & Nurianna (2014) keterampilan yaitu usaha seorang pegawai untuk melangsungkan

kewajiban serta tanggung jawab yang telah disampaikan kepada organisasi/perusahaan dengan maksimal. Jika pejabat/pegawai pengelola anggaran tidak kompeten, maka tugas dan kewajiban organisasi/perusahaan yang ditugaskan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga memperlambat penyerapan anggaran. Hasil penelitian bertentangan dengan temuan Trisna et al (2020), Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019), dan Riska (2018) yang menyimpulkan bahwa SDM tidak berpengaruh pada keterlambatan penyerapan. Hasil tersebut selaras juga dengan yang diungkapkan oleh Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), dan Fahnur (2018) bahwa SDM berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan.

Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh pada keterlambatan penggunaan anggaran. Probabilitasnya signifikan terbukti dengan diperolehnya nilai 0,009 karena ($p < 0,05$). Konsisten dengan hipotesis sebelumnya, pengadaan barang/jasa berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil penelitian searah dengan penelitian Syafira & Vina (2020), menjelaskan keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan yang bersertifikat karena pemberian sertifikat pengadaan barang/jasa sangat selektif, hanya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pengadaan yang diberikan sertifikat serta pegawai tersebut harus telah lulus ujian pengadaan barang/jasa. Hal tersebut terbukti melalui tanggapan terhadap pertanyaan tentang pengadaan barang/jasa, karena mayoritas responden (31,84%) memilih opsi skala ketiga (Kadang-kadang). Berdasarkan temuan persentase tersebut, pertanyaan pada "Keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan bersertifikat" memiliki proporsi tertinggi. Data tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya petugas dan pelaksana pengadaan yang berkualitas di KPPN Jambi sehingga menyebabkan tertundanya penyerapan anggaran bagi 89 satker.

Proporsi terbesar kedua dari tanggapan responden sesuai dengan pilihan skala 4 (sering), yaitu sebesar 28,25%. Menurut temuan persentase ini, pertanyaan ketujuh, "Penjadwalan lelang yang terlambat," memiliki proporsi tertinggi kedua. Anggaran untuk 89 satker di KPPN Jambi terkendala karena persiapan panitia lelang dan pelaksanaan lelang, sebagaimana terlihat dari temuan tersebut. Karmilawati (2020) menyatakan permasalahan penyerapan anggaran terlambat karena proses lelang dan pengadaan barang/jasa yang terlambat dilaksanakan menyebabkan terlambatnya tanda tangan kontrak. Zaenudinsyah (2016) juga menjelaskan terlambatnya penyerapan anggaran pada pengadaan barang/jasa disebabkan oleh pelaksanaan lelang. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Trisna et al (2020), Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019) dan Riska (2018), pengadaan barang/jasa mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Namun, temuan ini searah dengan temuan Karmilawati (2020), Syafira & Vina (2020), Rerung et al, (2017) dan Fahnur (2018) yang menemukan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh pada keterlambatan pemanfaatan anggaran.

5. Kesimpulan

Penelitian ini disimpulkan berdasarkan temuan analisis dan pembahasan pada satker K/L di wilayah pembayaran KPPN Jambi. Perencanaan anggaran berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, semakin tinggi perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran semakin lambat. SDM juga berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, semakin tinggi SDM maka semakin tinggi pula keterlambatan penyerapan anggarannya. Terakhir, pengadaan barang/jasa juga berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran, semakin tinggi pengadaan barang/jasa, semakin tinggi keterlambatan penyerapan anggarannya.

Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen diduga masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Populasi yang digunakan hanya yang ada di Kota Jambi.

Saran dalam penelitian yang dapat dipertimbangkan antara lain, peneliti berikutnya disarankan memvariasikan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti pelaksanaan anggaran serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperkuat hasil karena persepsi responden rentan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dapat dilakukan dengan observasi dilengkapi dengan wawancara. Saran berikutnya bagi instansi atau satker, hasil penelitian ini sangatlah penting untuk memberikan informasi mengenai kondisi anggaran sehingga perlu diambil tindakan untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Disarankan kedepannya menyusun anggaran dengan program/kegiatan yang lebih realistis dan memberikan pelatihan secara rutin terhadap pengelola anggaran.

Daftar Pustaka

- Dewi, N. L. P. L., Dwirandra, A. A. N. B., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(4), 1609–1638
- Fahnur, A. S. (2018). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Medan II Tahun Anggaran 2017. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. 8(1), 108–117.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan & Malayu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Hutapea & Nurianna. (2014). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karmilawati. (2020). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran Kppn Makassar I Tahun Anggaran 2018. Skripsi. Muhammadiyah Makassar.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 11–19.
- Nafarin, M. (2015). Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Salemba Empat. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 1. Andi Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB. (2021). Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. (2021). Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. 8(2), 192–202.

- Riska, W. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera. *Jurnal riset akuntansi*. 7(2), 24-56.
- Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Selatan (Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang).Tesis. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Siagian., Sondang P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. 8(1), 129-138.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi 2. ALFABETA.
- Syafira, R. N., & Vina, C. M. (2020). The Analysis of Factors Causing The Delay of Budget Absorption (Case Study At Balai Besar Wilayah Sungai Citarum PUPR Ministry). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 119-129.
- Trisna., Hasia, M., & Satna, S. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun Anggaran 2019. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 1(2), 124-129.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Vety, Y. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 Pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Tegal.Skripsi.Universitas Pancasakti Tegal.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67-83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1221-1234. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1450/1211>